

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTABILITAS TERHADAP  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**(Survei Pada OPD Kabupaten Klungkung)**

I Putu Deddy Samtika Putra <sup>1)</sup>

Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati <sup>2)</sup>

Universitas Hindu Indonesia, Email: deddy.samtika@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research was conducted by taking the location of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Klungkung Regency Government. The number of samples taken was 143 respondents. The method used was purposive sampling and through non-response bias sample testing. Data collection was carried out by distributing questionnaires. The research instrument used was the validity test and the reliability test. The analysis technique used is the classical assumption test and multiple linear regression analysis, determination analysis, F-test and t-test.*

*From the results of the study, it is known that regional financial supervision has no effect on the performance of local governments at the Klungkung Regency Government, as evidenced by the  $t$ -count = 1.503 with a significance value of  $0.135 > 0.05$ , thus  $H_1$  is rejected. The transparency of regional financial management has a positive effect on the performance of local governments in the Klungkung Regency Government, as evidenced by the value of  $t$ -count = 4.365 with a significance value of  $0.000 < 0.05$ , thus  $H_2$  is accepted. Accountability has a positive effect on the performance of the local government at the Service in the Klungkung Regency Government, as evidenced by the  $t$ -count = 3.058 with a significance value of  $0.003 < 0.05$ , thus  $H_3$  is accepted.*

**Keywords:** *Regional Financial Supervision, Transparency of Regional Financial Management, Accountability and Performance of Local Government*

**PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan

(Mohamad Mahsun, 2006:4). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga (Mohamad Mahsun, 2012:141).

Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal (Audyta et al., 2013). Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kinerjanya harus ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya. harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya

otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

Dikutip dari sumber berita @MetroBali.com : 10 OPD Pemkab Klungkung Dievaluasi Inspektorat Provinsi Bali. SAKIP merupakan salah satu sistem untuk mengetahui akurasi atau kebenaran dari pada implementasi pelaksanaan kinerja OPD di lingkungan Pemkab Klungkung, Bupati Suwirta mengharapkan kepada tim evaluasi disamping melakukan pemeriksaan dan pengawasan, tentunya tim evaluasi dapat melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan Pemkab Klungkung untuk kesempurnaan daripada laporan-laporan maupun perencanaan atau integrasi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaksanaannya, sehingga secara keseluruhan pemeritahan di lingkungan provinsi/kota/kabupaten yang ada di provinsi Bali dapat memberikan laporan kinerja yang semakin baik dan dapat menghasilkan output yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja yang dievaluasi antara lain, perencanaan, pelaporan, pengukuran, evaluasi dan capaian kinerja dari masing – masing OPD di lingkungan pemerintahan provinsi/kota/kabupaten. Dalam menyusun laporan SAKIP terdapat enam (6) indikator yang perlu dicermati antara lain, apakah indikator kinerja sudah memenuhi unsur SMART, yaitu *Spesifik* (jelas), *Measureable* (dapat diukur), *Archivable/Attainable* (dapat diraih), *Relevant* (relevan dengan kinerja yang ingin diukur), *Time Bound* (memiliki batasan waktu pengukuran).

Transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klungkung memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Penghargaan ini merupakan yang ketiga kali diraih atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi tahun 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyatakan perolehan penghargaan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kordinasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akan tetapi belum sepenuhnya aparat pemerintah bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, itu dibuktikan dengan terungkapnya kasus Korupsi pada Proyek Biogas di Kecamatan Nusa Penida. Dikutip dari berbagai sumber terpercaya seperti Bali Post, Nusa Bali, IDN Times Bali dan hasil Laporan Audit dari BPK.

Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Klungkung sejak tahun 2015 silam, Hasil audit BPK terkait kerugian negara dari proyek tersebut baru turun sekitar bulan Agustus tahun 2018 dan diketahui nilainya mencapai Rp. 792.000.000. Dengan terjadinya kasus ini sudah sangat jelas merugikan masyarakat luas yang tidak bisa merasakan hasil dari program yang di rencanakan pemerintah, hanya karena beberapa oknum yang dengan sengaja ingin mencari keuntungan pribadi. Masyarakat menilai masih belum optimal kinerja aparat pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawab terutama dibidang pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah.

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah. Hal ini berarti semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Auditya et al., 2013, Wiguna et al., (2015), Adiwirya dan Sudana (2015). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Teori dasar yang digunakan adalah *Agency theory* yang membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. *Agency theory* memandang bahwa agen ttidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal* (Tricker, Opcit, 1984).

Menurut Halim dan Iqbal, (2012:37), secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator: Kualitas Pengawasan, Standar Pengawasan, Peningkatan Pengawasan dan Tugas Pengawasan.

Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyebutkan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator: Prinsip Transparansi, Penyajian Tranparansi, Terakomodasinya suara/usulan rakyat, Kebijakan Transparansi dan Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator: Pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka, menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat, Pengawasan laporan keuangan, Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik dan Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. (Adisasmita (2011:89).

Mohamad Mahsun (2012:141) mendefinisikan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota/karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator: Peran pemerintah untuk menerima aspirasi masyarakat, Perencanaan anggaran, Pengendalian

anggaran, Target program pemerintah dan Pemerintahan yang adil dan jujur.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat yang dilandasi dengan tinjauan pustaka maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

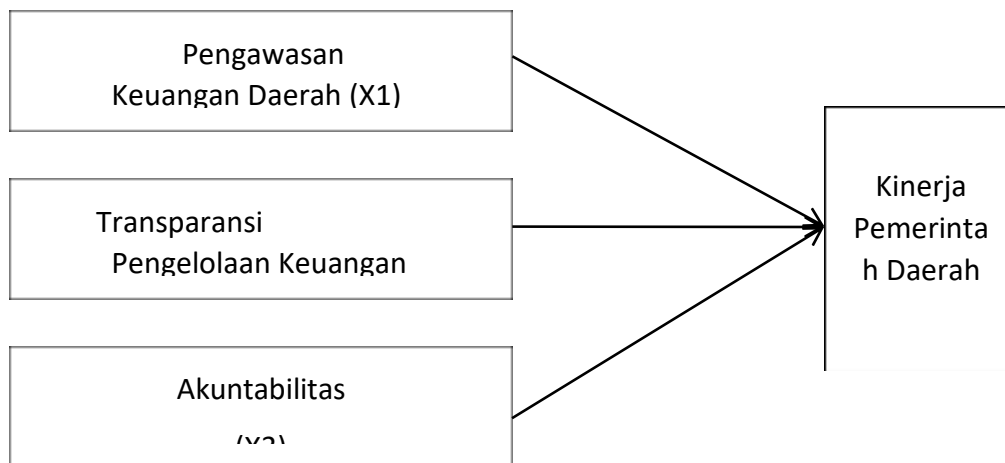
H1 : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

H2 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

H3 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

### METODE PENELITIAN

Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat setingkat Kepala Dinas/Badan/Inspektur, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Umum di seluruh OPD Kabupaten Klungkung dan mempunyai masa kerja minimal satu tahun. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 152 orang

responden.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 0,011 + 0,139 X_1 + 0,413 X_2 + 0,228 X_3 + \epsilon_i$$

Keterangan :

Y : Kinerja Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien Regresi Pengawasan Keuangan Daerah

$\beta_2$  : Koefisien Regresi Transparansi Pengelolaan Keuangan

$\beta_3$  : Koefisien Regresi Akuntabilitas

X<sub>1</sub> : Pengawasan Keuangan Daerah

X<sub>2</sub> : Transparansi Pengelolaan Keuangan

X<sub>3</sub> : Akuntabilitas

e : Error

## HASIL PENELITIAN

Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuisisioner sebanyak 152 kuisisioner dan kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 143 kuisisioner. Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 143 responden diperoleh bahwa hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dimana nilai korelasinya lebih besar dari 0,3 dan koefisien keandalannya (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,5. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui asumsi ini, dilakukan pengujian menggunakan uji statistik *non-parametric Kolmogorov-Smornov* (K-S). Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya  $> 0,05$ . Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		143
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.01482486
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.063
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		1.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.201

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, nilai sig 0,201 sebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance inflation factor (VIF)*. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.011	.171		.066	.948		
FdX1	.139	.093	.120	1.503	.135	.682	1.465
FdX2	.413	.095	.393	4.365	.000	.535	1.869
FdX3	.228	.074	.240	3.058	.003	.705	1.419

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 2 bahwa nilai *tolerance* pada variabel pengawasan keuangan daerah (X1) sebesar 0,682, transparansi pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 0,535 dan akuntabilitas (X3) sebesar 0,705 > 0,10, sedangkan nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) variabel pengawasan keuangan daerah (X1) sebesar 1,465, transparansi pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 1,869 dan akuntabilitas (X3) sebesar 1,419 < 10. Maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Metode ini dilakukan dengan meregresi nilai *absolut* residual dengan variabel bebas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan model bebas dari heteroskedastisitas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3 Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.496	.114		13.141	.000
FdX1	-.004	.062	-.007	-.066	.947
FdX2	-.021	.063	-.038	-.331	.741
FdX3	.019	.050	.039	.389	.698

a. Dependent Variable: Abs\_Ut

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 3 pada variabel pengawasan keuangan daerah (X<sub>1</sub>) sebesar 0,947, transparansi pengelolaan keuangan daerah (X<sub>2</sub>) sebesar 0,741 dan akuntabilitas (X<sub>3</sub>) sebesar 0,689 sebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam model regresi linier berganda ini, variabel independen yang digunakan adalah pengawasan keuangan daerah (X<sub>1</sub>), Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X<sub>2</sub>), dan sistem Akuntabilitas (X<sub>3</sub>). Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS untuk analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4  
 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.011	.171		.066	.948
FdX1	.139	.093	.120	1.503	.135
FdX2	.413	.095	.393	4.365	.000
FdX3	.228	.074	.240	3.058	.003

a. Dependent Variable: FdY

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda untuk variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah yang telah diperoleh, terdapat nilai konstanta sebesar 0, yang artinya jika variabel Kinerja Pemerintah Daerah tidak dipengaruhi oleh semua variabel independen, maka besarnya rata-rata Kinerja Pemerintah Daerah adalah 0,011. Nilai-nilai koefisien

regresi pada variabel-variabel bebasnya menunjukkan jika variabel bebasnya dinaikkan nilai sebesar satu unit dan variabel bebas lainnya konstanta atau nilai lainnya sama dengan nol, maka nilai variabel dependen akan disesuaikan dengan koefisien regresinya

Uji Ketepatan Perkiraan (Koefisien Determinasi  $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang digunakan dalam koefisien determinasi adalah dengan menggunakan nilai *R-Square*. Nilai tersebut yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Hasil pengujian menggunakan SPSS didapatkan nilai koefisien determinasi seperti yang tertera dalam Tabel 5 :

Tabel 5  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 <sup>a</sup>	.401	.388	2.03661

a. Predictors: (Constant), FdX3, FdX1, FdX2

Sumber: Data Diolah

Nilai *R Square* yang diperoleh berdasarkan Tabel 5 adalah sebesar 0,388, hal ini berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 38,80%, sedangkan sisanya 61,20% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam model regresi dalam penelitian ini.

Secara simultan, pengujian model dilakukan dengan uji F-test. Menurut Ghozali, (2011:98). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji f-test digunakan untuk menguji model, yaitu pengaruh pengawasan keuangan daerah, transparansi Pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah jika signifikansi  $\leq 0,05$ , maka model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 6  
 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)  
 ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	382.601	3	127.534	30.748	.000 <sup>b</sup>
	Residual	572.392	138	4.148		
	Total	954.993	142			

a. Dependent Variable: FdY  
 b. Predictors: (Constant), FdX3, FdX1, FdX2

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian diatas, ternyata dengan tingkat keyakinan diri 95%, kesalahan 5% dan derajat bebas pembilang 3 dan derajat penyebut 138, nilai  $F_{hitung}$  sebesar 30,748 dengan signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dengan demikian model penelitian dapat diterima, sehingga model regresi dapat digunakan terhadap mengukur Kinerja Pemerintah Daerah.

Secara parsial pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghozali, (2011:98). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen digunakan untuk menguji hipotesis  $H_1$ ,  $H_2$  &  $H_3$ , yaitu pengaruh pengaruh pengawasan keuangan daerah (X1), transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2), dan akuntabilitas (X3) secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik t-test  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.011	.171		.066	.948
	FdX1	.139	.093	.120	1.503	.135
	FdX2	.413	.095	.393	4.365	.000
	FdX3	.228	.074	.240	3.058	.003

a. Dependent Variable: FdY

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil uji, tampak jelas bahwa variabel pengaruh pengawasan keuangan daerah (X1) nilai  $t_{hitung} = 1,503$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,135, maka ternyata nilai signifikansi hitung lebih besar dari 0,05, dengan demikian  $H_1$  ditolak. Ini berarti bahwa secara statistik untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan ( $\alpha$ ) = 5%, secara parsial pengaruh

pengawasan keuangan daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Artinya jika terjadi semakin tinggi pengawasan keuangan daerah (X1) akan menurunkan kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dengan demikian hipotesis penelitian tidak teruji kebenarannya.

Variabel transparansi Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2) nilai  $t_{hitung} = 4,365$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, maka ternyata nilai signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05, dengan demikian  $H_2$  diterima. Ini berarti bahwa secara statistik untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan ( $\alpha$ ) = 5%, secara parsial transparansi Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Artinya jika terjadi semakin tinggi Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2) akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan keuangan daerah (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung teruji kebenarannya.

Variabel akuntabilitas (X3) nilai  $t_{hitung} = 3,058$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, maka ternyata nilai signifikansi hitung lebih kecil dari 0,05, dengan demikian  $H_3$  diterima. Ini berarti bahwa secara statistik untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan ( $\alpha$ ) = 5%, secara parsial akuntabilitas (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Artinya jika terjadi semakin tinggi akuntabilitas (X3) akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung teruji kebenarannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan, maka didapat simpulkan hasil penelitian sebagai berikut: Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi pengawasan keuangan daerah maka akan mengakibatkan pegawai dapat merasa tertekan karena kurangnya mendapat kesempatan untuk pengembangan diri sehingga membuat kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung juga akan menurun.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung juga akan meningkat.

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini menunjukkan semakin baik akuntabilitas maka kinerja pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung juga akan meningkat.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diberikan: (1) Bagi Dinas di Pemerintah Kabupaten Klungkung Diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman Pengawasan Keuangan Daerah yang dimiliki oleh setiap pegawai baik dari pimpinan, subbagian bahkan pegawai dengan melalui program pelatihan dan agar Kinerja Pemerintah Daerah yang dihasilkan dari pemerintah dapat ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah. (2) Agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan efektif, sebaiknya peralatan yang usang/rusak didata secepat mungkin. sehingga kegiatan pembuatan laporan keuangan tidak terganggu oleh peralatan yang rusak tersebut. maka kinerja pemerintah daerah pelaporan keuangan dapat dihasilkan tepat waktu. (3) Diharapkan dapat terus meningkatkan Akuntabilitas agar mendapatkan hasil dari nilai informasi yang lebih baik serta pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai Akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adiwirya, M Firdiansyah dan Sudana Putu. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. E-Jurnal Akuntansi.
- Asrida, 2012. *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan*

terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.  
Jurnal Kebangsaan. 1(1). 29- 40.

Auditya, Lucy., Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan  
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.  
Jurnal Fairness.

Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta,  
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama,  
Salemba empat, Jakarta

Harahap, Sofyan Syafri. 2012. Teori Akuntansi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Hasibuan, Malayu S.P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi  
Pemerintahan. Jakarta

Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Mahsun, Mohamad. 2011. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahsun, Mohamad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta,  
Yogyakarta.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung  
jawaban Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor  
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wiguna, Made BS., Yuniartha G., dan Darmawan N. 2015. Pengaruh Pengawasan  
Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah  
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.